

**ANALISIS PERAN KEBIJAKAN POLITIK DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT DESA BANDAR
SETIA,KECAMATAN PERCUT SEI TUAN,KABUPATEN DELI SERDANG**

Dules Ery Pratama Harahap¹, Enjellina Sinaga², Murniwati Lase³, Reyland Silverius
Sinaga⁴, Halking⁵

PPKn FIS Universitas Negeri Medan ^{1,2,3,4,5}

¹erydules@gmail.com , ²angelsinaga924@gmail.com ,
³watimurni575@gmail.com , ⁴rey2003sng@gmail.com ,
⁵halking123@unimed.ac.id .

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of political policy in improving the social welfare of the community in Bandar Setia Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Political policy is understood as a strategic instrument of the village government in planning, implementing, and evaluating development programs that focus on community needs. The research employed a qualitative approach through interviews, observations, and documentation to obtain in-depth data regarding the implementation of village political policies. The findings show that the village government has implemented various programs such as infrastructure improvements, posyandu (integrated health service) activities, stunting prevention efforts, and the distribution of social assistance, all of which are considered effective in enhancing residents' quality of life. Nevertheless, several challenges remain, particularly related to the limited public understanding of village authority and the lack of full community involvement in the planning process. Overall, the political policies implemented have had a positive impact on social welfare, yet improvements are still needed in terms of public participation and the optimization of village governance.

Keywords: Political Policy, Social Welfare, Village Governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan politik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan politik dipahami sebagai instrumen strategis pemerintah desa dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program-program pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan

adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan politik desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan berbagai program seperti perbaikan infrastruktur, pelaksanaan kegiatan posyandu, penanganan stunting, serta penyaluran bantuan sosial yang dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Meskipun demikian, beberapa hambatan masih muncul, terutama terkait rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kewenangan desa serta ketidakterlibatan penuh masyarakat dalam proses perencanaan. Secara keseluruhan, kebijakan politik yang diterapkan terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial, namun masih memerlukan peningkatan dari aspek partisipasi publik dan optimalisasi tata kelola pemerintahan desa.

Kata kunci: Kebijakan Politik, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan Desa.

A. Pendahuluan

Kebijakan politik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pelaku politik untuk suatu kepentingan yang ada didalam kelompok. Kebijakan tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini akan menentukan bagaimana keberlangsungan kelompok tersebut. Suatu kebijakan diatur oleh pihak yang memiliki kewenangan baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun desa untuk mengatur kehidupan dari masyarakat. Kebijakan bukan sekedar aturan tertulis namun juga memiliki cakupan berupa strategi, program, serta tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Cakupan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Siregar, 2015)

Kebijakan politik dapat terjadi karena adanya interaksi antara lembaga negara, aktor politik, dan masyarakat. Dalam interaksi ini masyarakat melalui kehidupan sosialnya akan mengalami permasalahan sosial kemudian memberikan aspirasinya kepada aktor politik, lalu aktor politik akan menyampaikan kepada lembaga negara untuk mencari penyelesaian dari persoalan tersebut. Melalui proses tersebut lembaga negara akan memberikan kebijakan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan peningkatan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik setelah terlepas dari permasalahan yang ada tersebut. Kebijakan yang dihasilkan harus menjadi komitmen pemerintah untuk jawaban akan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan akan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga kesehatan masyarakat. Kebijakan politik memiliki peran untuk

memberikan perubahan dan menjadi instrumen penting menciptakan perubahan sosial. (Kristian, 2023)

Adanya kebijakan politik akan memberikan kesejahteraan sosial untuk masyarakat. Dengan kebijakan politik yang baik dari para aktor politik, kesejahteraan yang ideal akan terjadi dalam masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketika kebutuhan dasar warga, baik material maupun nonmaterial, dapat terpenuhi secara layak. Kebutuhan tersebut mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial (Firdaus et al., 2024). Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan semata, tetapi juga dari kualitas hidup yang memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal. Kesejahteraan masyarakat akan terlihat juga melalui pembangunan yang dilakukan oleh aktor politik yang telah ada. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara maupun pemerintah daerah.

Peningkatan kesejahteraan sering diwujudkan melalui berbagai program, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesejahteraan masyarakat juga erat kaitannya dengan keadilan sosial. Artinya, kesejahteraan tidak hanya

harus dirasakan oleh kelompok tertentu saja, tetapi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Apabila kesejahteraan sudah tercapai, maka masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk hidup produktif, mandiri, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerahnya. Desa Bandar Setia yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, perdagangan, dan sektor informal lainnya. Mata pencaharian dari masyarakat Desa Bandar Setia masih memiliki berbagai permasalahan sosial yang sering terjadi seperti tingkat pendapatan yang belum merata, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kebijakan politik pemerintah desa maupun kebijakan yang bersumber dari pemerintah daerah dan pusat sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Implementasi kebijakan politik, misalnya melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan infrastruktur, diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Bandar Setia. Namun fenomena yang terjadi masih belum memenuhi sebagaimana yang

diharapkan dengan konteks kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Kebijakan yang dirancang seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan masyarakat untuk proses perencanaan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian mengenai Peran Kebijakan Politik terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan politik tersebut dijalankan, sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan sosial, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan politik berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan pandangan masyarakat terkait fenomena sosial secara natural dan kontekstual. Penelitian dilaksanakan di Desa Bandar Setia dengan mempertimbangkan relevansi lokasi terhadap fokus penelitian. Secara

geografis desa ini berbatasan dengan Desa Pematang Lalang dan Bandar Khalifah di sebelah timur, serta Desa Sampali dan Laut Dendang di sebelah barat. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode penelitian yang telah ditentukan.

Subjek penelitian terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Bandar Setia. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui, mengalami, atau terlibat langsung dalam proses kebijakan politik dan kondisi kesejahteraan sosial di desa. Variabel utama penelitian adalah kebijakan politik dalam peningkatan kesejahteraan sosial, yang dioperasionalkan melalui indikator bentuk kebijakan, proses perumusan, implementasi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer, hasil wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan. Instrumen penelitian disusun sesuai metode yang digunakan, meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, serta format dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi kondisi sosial masyarakat, serta penelusuran dokumen kebijakan

desa. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai peran kebijakan politik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan(Huruf 12 dan Ditebalkan)

Hasil

1. Kebijakan Politik yang Tepat untuk Memberikan Perubahan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Setia

Melalui data yang telah didapatkan di lapangan melalui Desa Bandar Setia, kebijakan politik yang diterapkan pemerintah Desa Bandar Setia menunjukkan bahwa arah pembangunan desa telah disusun melalui mekanisme yang jelas, terstruktur, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Secara umum, pemerintah desa telah melaksanakan kebijakan yang berfokus pada peningkatan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut disusun melalui forum musyawarah desa (Musdes), sehingga setiap keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan beberapa program prioritas, seperti peningkatan pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, penguatan UMKM desa, serta

penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Program-program tersebut tidak hanya menasar pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan secara bertahap telah memberikan dampak nyata terhadap mobilitas warga. Masyarakat lebih mudah mengakses sekolah, pasar, puskesmas, serta tempat kerja. Perubahan ini berhasil mendorong peningkatan aktivitas ekonomi desa. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur seperti jalan, penerangan, dan fasilitas umum adalah wujud nyata kebijakan politik yang efektif, karena memberikan manfaat langsung pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga menjalankan program pemberdayaan seperti pelatihan UMKM, pembinaan kelompok tani, serta dukungan modal usaha melalui dana desa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Pendekatan pemberdayaan ini relevan dengan konsep pembangunan berbasis masyarakat (community-based development), di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam proses pembangunan.

Kebijakan politik desa juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan temuan lapangan, distribusi bantuan sosial seperti BLT Dana Desa dan bantuan sembako dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan mengikuti mekanisme pendataan yang telah ditetapkan. Proses penyaluran berjalan lancar dan tidak ditemukan keluhan signifikan dari masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) dalam melaksanakan kebijakan sosial. kebijakan politik yang diterapkan di Desa Bandar Setia telah mampu memberikan perubahan sosial yang signifikan. Pemerintah desa berhasil mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan konsep *welfare state*, di mana negara dalam konteks ini pemerintah desa bertanggung jawab memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar.

2. Peran Kebijakan Politik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Bandar Setia

Peran kebijakan politik di Desa Bandar Setia terlihat dari bagaimana pemerintah desa menjalankan tugasnya sebagai fasilitator,

penggerak pembangunan, dan pengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah desa bekerja secara sinergis dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menyusun dan mengawasi kebijakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan BPD berjalan harmonis dan kooperatif, sehingga setiap kebijakan dapat terlaksana tanpa hambatan yang berarti. Dalam penyelenggaraan kebijakan, pemerintah desa menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, ketika terjadi masalah banjir di beberapa dusun, pemerintah desa segera menindaklanjuti dengan program normalisasi drainase dan pembangunan parit baru. Tindakan cepat tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa mampu menangani persoalan sosial secara efektif.

Selain itu, peran kebijakan politik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Warga Desa Bandar Setia menunjukkan antusiasme dalam mengikuti gotong royong, hadir dalam musyawarah desa, dan memberikan masukan terkait anggaran desa.

Meningkatnya partisipasi ini merupakan hasil dari kebijakan politik yang inklusif dan komunikatif, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Keberhasilan

kebijakan juga tidak terlepas dari arahan dan pengawasan BPD. Berdasarkan wawancara dengan aparat desa, BPD secara rutin memberikan masukan terkait skala prioritas pembangunan dan turut memonitor pelaksanaan program. Pemerintah desa menjalankan arahan BPD dengan baik dan terbuka terhadap evaluasi. Kolaborasi ini menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Program kesejahteraan sosial seperti bantuan lansia, bantuan anak yatim, dan BLT Dana Desa juga menunjukkan peran kebijakan politik yang mendukung stabilitas sosial. Masyarakat mengakui bahwa program-program tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di kalangan keluarga kurang mampu. Efektivitas kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa memahami kondisi sosial masyarakat dan mampu menyusun program yang tepat sasaran. Melihat hasil-hasil tersebut, jelas bahwa kebijakan politik yang diterapkan pemerintah Desa Bandar Setia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, inklusif, dan berdaya. Kebijakan politik telah berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat kohesi sosial sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat desa.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Bandar Setia. Hal ini terlihat dari implementasi berbagai program pemerintah desa yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terbukti mampu mendorong perubahan sosial yang lebih merata, terutama ketika disertai partisipasi aktif dari warga desa. Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kelebihan dalam pelaksanaan kebijakan politik di desa, antara lain komitmen perangkat desa dalam menjalankan program pembangunan serta adanya upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Namun, terdapat pula kekurangan yang menjadi hambatan, seperti keterbatasan anggaran desa, koordinasi internal yang belum optimal, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Secara keseluruhan, kebijakan politik yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya maksimal. Untuk itu, pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan kebijakan desa, memperkuat koordinasi antar-perangkat desa, serta mendorong budaya partisipasi publik yang lebih inklusif. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, diharapkan kebijakan politik ke depan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Desa Bandar Setia

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. (*No Title*).

Bappenas. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Jakarta: Bappenas.

Jurnal :

Firdaus, N. A., Widianoro, C. E., & Purwandari, T. (2024). Analisis Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Klasterisasi Sosial-Ekonomi Menggunakan Fuzzy C-Means. *BIASTATISTICS: JOURNAL OF STATISTICS THEORY AND APPLICATIONS*, 1, 21–32.

Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di indonesia. *Jurnal Dialektika*, 21(2), 88–98.

Siregar, H. (2015). Militia : Jurnal Komunikasi dan Politik Dimensi. *Jurnal Komunikasi Dan Politik*, 1(1), 63–72.

Mendrofa, H. M. H., & Sonuari, M. I. S. M. I. (2025). Political Will Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kebijakan dan Implementasi. *Knowledge on Sustainable Economy, Public Policy, and Social Innovations*, 1(1), 46-52.

Fentiani, S. A., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2025). Peran Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 7(1).

Astuti, D. (2021). Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(3), 193-205.

Putri, D. E. (2024). *Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Dye, T. R. (1992). Understanding public policy.

Easton, D. (1965). A systems analysis of political life ER.

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. *Polity*.

- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 164-190.
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135-142.
- Midgley, J. O. (1995). Social development: The developmental perspective in social welfare.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Permatasari, N. K. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dimediasi Oleh Indeks Pembangunan Manusia Dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas. *Tirtayasa Ekonomika*, 19(2), 275-288.
- Khan, H. A. (2004). Development as freedom. *CIRJE Discussion Paper No. F-257, Graduate School of Economics, University of Tokyo, Tokyo, Japan*.
- Edi, S. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Titmuss, R. M. (1975). Social policy: An introduction.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.